

CV SINGKAT

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S,H, M.Hum.
NIP : 196507101990031007
Tempat/Tgl Lahir : Manggarai, NTT 10 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IVd
Jabatan : Kepala Badan Keahlian DPR RI
Institusi : Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pendidikan:

- Sarjana Hukum (S1) Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (1989)
- Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.(1997)
- Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Indonesia (2003)

Riwayat Pekerjaan:

1. 1990-1995 : Staf Sekretariat Jenderal DPR RI
2. 1995-2015 : Pejabat Fungsional Peneliti Bidang Hukum
Pusat Penelitian dan Pelayanan Informasi
Sekretariat Jenderal DPRI RI
(Jabatan terakhir Peneliti Madya Bidang HukumIV/C).
3. 2015- 2020 : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI RI.
4. 2020 sd Sekarang : Kepala Badan Keahlian DPR RI

Aktivitas lain:

- Dosen/Staf Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila, Jakarta.
- Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Dan Universitas Pancasila
- Co-Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (telah menghasilkan 5 Doktor dan sedang membimbing 2 Calon Doktor)

Demikian C V singkat ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Nopember 2020

Dr. Inosentius Samsul, S,H, M, Hum

NIP 196507101990031007



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
UNIT KERJA : BADAN KEAHLIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INOSENTIUS SAMSUL
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 421150

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.775.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/160 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/200 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/50 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 90 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 19.777 m² di TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 1006 m² di KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/80 m² di KOTA TANGERANG , LAINNYA Rp. 450.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m²/120 m² di KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 208.500.000**

1. MOBIL, NISSAN SERENA A/T MNIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000



3. MOTOR, KAWASAKI AX125B Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000
4. MOTOR, SUZUKI RV120 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
5. MOTOR, HONDA MEDICIL A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
6. MOTOR, HONDA NE 100 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	95.705.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	49.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.700.000
Sub Total	Rp.	3.159.405.000
III. HUTANG	Rp.	362.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.797.405.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.